

## BAB.I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan. Menurut Hadi(2014), menyebutkan bahwa lingkungan adalah tempat manusia hidup dan bergantung, lingkungan bisa ada tanpa manusia, akan tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan. Selanjutnya pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama serta seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan tersebut mempunyai makna bahwa setiap orang atau masyarakat dapat melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan berperan aktif secara sukarela. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan (pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1990).

Pengelolaan lingkungan wilayah pesisir merupakan upaya pelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir yang diwujudkan dengan pengelolaan yang memperhatikan karakter yang spesifik. Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan untuk mengetahui hubungan antara manusia dengan wilayah pesisir sesuai tujuannya menurut batas-batas wilayah pesisir sebagai upaya mewujudkan kelestarian. Menurut Dahuri dkk., (2001) menyatakan bahwa batas – batas fisik pesisir tidak terlalu rigid dalam pengelolaan lingkungan wilayah pesisir. Batas-batas tersebut ditentukan apabila dalam pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir memiliki tujuan yang berdeda. Apabila pengelolaan bertujuan untuk mencegah pencemaran dan sedimentasi maka batas wilayah pesisir ke arah darat adalah mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) serta daerah laut yang masih mengalami pencemaran dan sedimentasi. Jika tujuannya

adalah untuk mengendalikan laju erosi (abrasi) pantai maka batas ke arah darat cukup sampai pada lahan pantai yang diperkirakan terkena abrasi, sedangkan untuk batas laut adalah daerah yang terkena distribusi sedimen abrasi yang biasanya sampai pada daerah pemecah gelombang (breakwater zone).

Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyebutkan bahwa untuk mendukung kelestarian dan keberlanjutan lingkungan pesisir maka dalam pengelolaannya dilakukan sesuai tujuan pengelolaan pesisir sebagai berikut: (a) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (b) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (c) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan Pulau-Pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, dan (d) meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup proses-proses yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar (Dahuri dkk ,2001). Maksud dari pengertian tersebut adalah ekosistem pesisir merupakan wilayah yang dinamis, memiliki keanekaragaman habitat yaitu di darat dan di laut serta saling interaksi antar habitat. Selanjutnya menurut Djunaedi & Basuki (2002), menyebutkan bahwa ekosistem pantai/pesisir merupakan gabungan dari komponen biologi, ekologi dan fisik pantai termasuk

interaksinya. Binatang, tumbuhan dan organisme termasuk dalam komponen biologi/ekologi, selanjutnya perairan pantai, muara sungai, karang pantai merupakan komponen fisik pantai/pesisir. Interaksi yang ada adalah pertukaran energi dan zat yang dimulai dengan konversi cahaya matahari, nutrisi dasar, karbon dioksida dan mineral oleh tumbuhan sebagai produsen primer menjadi bahan dasar makanan untuk binatang.

Dari segi regulasi, seiring dengan adanya otonomi daerah tahun 1999 pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia telah mengalami perubahan. Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir telah berganti dari pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir secara bertanggung jawab sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya undang-undang dan peraturan daerah yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya serta kesadaran nilai pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat relatif kurang sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pantai/pesisir masih terbatas (Rudiyanto, 2004).

Kerusakan yang umum terjadi di wilayah pesisir adalah akibat adanya abrasi. Abrasi merupakan mundurnya garis pantai yang disebabkan oleh perpindahan sedimen yang digerakan oleh gelombang air laut yang berakibat pada perubahan garis pantai, kerusakan tambak maupun kegiatan lainnya yang berbatasan langsung dengan air laut (Hakim & Krisna, 2012). Menurut Dahuri et al., (2001) menyebutkan bahwa sebab dari abrasi pantai dapat dikarenakan oleh proses alami, kegiatan manusia atau kombinasi keduanya. Proses alami yang dimaksud adalah gelombang air laut sedangkan kegiatan manusia seperti penebangan

hutan (mangrove) dan pertanian yang mengabaikan konservasi tanah menyebabkan aliran sedimen.

Satuan (2010), menyebutkan bahwa pantai utara (Pantura) Jawa Tengah terus digerus abrasi hingga mencapai 4.000 Ha dengan rata-rata daratan terseret arus mencapai 5-30 hektar per tahun yang mengakibatkan hilangnya hutan bakau, areal pertambakan dan pemukiman penduduk. Kabupaten Pemalang turut serta dalam “mensubsidi” luasan abrasi di Jawa Tengah yaitu seluas 445 Ha. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa pada tahun 1999 abrasi menggerus pantai wilayah pesisir Desa Pesantren seluas 2 km<sup>2</sup> dan hingga kini masih terkena abrasi seluas 0,02 – 0,025 km<sup>2</sup>/tahun yang menyebabkan beberapa kerusakan seperti hilangnya area pertanian, pemukiman penduduk dan tambak ikan milik penduduk. Angka tersebut dapat terus bertambah apabila pengelolaan lingkungan wilayah pesisir tidak menghiraukan penerapan kelestarian sumberdaya alam. Semakin berkembangnya pemanfaatan area mangrove untuk kegiatan perikanan tambak, baik secara intensif maupun tradisional turut andil dalam semakin bertambahnya abrasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pemalang (2014) menyebutkan bahwa luas tambak di wilayah Kabupaten Pemalang seluas 1728.3 Ha dan kecamatan Ulujami menduduki posisi luas tambak tertinggi yaitu 1534,2 Ha.

Kecamatan Ulujami merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pemalang yang terletak di wilayah pesisir. Wilayah ini memiliki luas 60,55 km<sup>2</sup>, dan merupakan daerah dataran terdiri dari 18 desa. Desa Pesantren merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Ulujami yang memiliki wilayah terluas diantara desa-desa pesisir se-Kabupaten Pemalang yaitu seluas 14,04 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 12.995 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) dukuh dan memiliki kepadatan sebesar 926 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administratif Desa Pesantren berbatasan dengan Laut Jawa disebelah Utara, Desa Kendalrejo Kec. Petarukan disebelah Barat, Desa Kandang Kec. Petarukan sebagai batas sebelah

Selatan, dan Desa Mojo Kec. Ulujami di sebelah Timur (BPS Pemalang, 2015). Desa Pesantren memiliki garis pantai sepanjang 3.150 meter, dan terdapat berbagai kegiatan di sepanjang pantai seperti pertanian, perikanan, perumahan, perkebunan, dan penambangan pasir (DKP Pemalang, 2014).

Salah satu upaya mengatasi kerusakan yang ada di wilayah pesisir adalah dengan rehabilitasi hutan mangrove. Menurut Keeley (2007), menyebutkan bahwa kata mangrove dalam bahasa Inggris merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Selanjutnya menurut Dahuri, dkk(2001), menyatakan bahwa hutan mangrove merupakan pendukung ekosistem yang penting di wilayah pesisir dan memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, menahan abrasi, amukan angin dan juga sebagai pemecah gelombang. Selain itu hutan mangrove juga memiliki manfaat ekonomis yaitu sebagai penyedia kayu, bahan bangunan maupun kayu bakar.

Hasil pemetaan satelit resolusi tinggi "satelit QuickBird-61cm Color" tahun 2009 memperlihatkan bahwa Kecamatan Ulujami memiliki hutan mangrove terluas diantara empat kecamatan pesisir (Kec. Pemalang, Kec. Petarukan, Kec. Taman, Kec. Ulujami) yaitu seluas 120.39 Ha, selanjutnya pada tahun 2010 Desa Pesantren memiliki hutan mangrove yang paling luas diantara 18 desa pesisir di Kabupaten Pemalang yakni seluas 92.17 Ha dan namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 72.75 Ha (KLH Kab. Pemalang, 2015). Tanaman tersebut pada awalnya tumbuh secara alami di sekitar wilayah pesisir Desa Pesantren, namun mangrove yang tumbuh secara alami jumlahnya cenderung sedikit sekitar 250 m<sup>2</sup> sehingga memiliki potensi kerentanan terhadap perubahan ekosistem menjadi lebih besar apabila terdapat tekanan ekologis. Dinas Kelautan dan Perikanan (2014), menyebutkan bahwa luas abrasi di Kab. Pemalang mencapai 231,04 Ha dan kerusakan

mangrove di Kabupaten Pemalang mencapai 32.02 Ha dari total luas wilayah hutan mangrove yaitu 314.5 Ha.

Upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Pesantren dimulai sejak sekitar tahun 1999. Meskipun demikian, bentuk pengelolaan kurang berkelanjutan karena tidak adanya keterpaduan diantara dimensi pembangunan. Kerusakan hutan mangrove yang pernah terjadi berupa penebangan tegakan / akar mangrove oleh masyarakat dimulai sejak tahun 1995, dan intensitas makin bertambah ketika masyarakat melakukan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak (Dipertanhut Pemalang, 2010).

Dalam rangka mengatasi adanya degradasi tersebut, Pemkab Pemalang telah melaksanakan berbagai upaya pengelolaan lingkungan guna mengembalikan/ menjaga kelestarian lingkungan wilayah pesisirnya. Pengelolaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sebagai pengambil manfaat sumberdaya pesisir maupun sebagai penerima dampak pengelolaan wilayah pesisir yang kurang bertanggung jawab. Tujuan melibatkan masyarakat adalah agar mereka mampu mengatasi dan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kajian mengenai strategi dalam upaya pengelolaan lingkungan hutan mangrove meliputi dimensi utama pengelolaan lingkungan yaitu secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Terjadinya abrasi di Desa Pesantren belum dapat diatasi secara optimal dengan rehabilitasi mangrove yang telah dilakukan. Tidak optimalnya upaya rehabilitasi mangrove dikarenakan adanya faktor alam dan faktor manusia (penebangan, penambangan pasir, konversi lahan). Diketahui bahwa luas hutan mangrove di Desa Pesantren mengalami penurunan yaitu 92.17 Ha pada tahun 2010 menjadi 72,75 Ha pada tahun

2014 (KLH Kab. Pematang, 2015). Sebagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut maka perlu diterapkan strategi pengelolaan yang sesuai. Selanjutnya berdasarkan dengan keadaan tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa hal meliputi:

1. Bagaimana kondisi hutan mangrove yang ada di Desa Pesantren ditinjau dari struktur komunitas mangrove dan biodiversitas?
2. Bagaimana upaya pengelolaan lingkungan hutan mangrove di Desa Pesantren berdasarkan persepsi dan partisipasi masyarakat?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengelolaan hutan mangrove di Desa Pesantren dalam rangka pengelolaan lingkungan wilayah pesisir secara berkelanjutan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah yang ada, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan strategi upaya pengelolaan lingkungan hutan mangrove di Desa Pesantren dalam rangka pengelolaan lingkungan wilayah pesisir secara berkelanjutan, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tujuan antara berupa:

1. Mengkaji kondisilingkungan hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Pesantren Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang berdasarkan struktur komunitas mangrove dan biodiversitas
2. Mengkaji upaya pengelolaan hutan mangrove di Desa Pesantren berdasarkan persepsi dan partisipasi masyarakat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam rangka mengelola lingkungan wilayah pesisir serta memberikan kontribusi pemikiran dalam hal :

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah berdasarkan temuan di lapangan sebagai penunjang (acuan) penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dan masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir di Kabupaten Pemalang.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengelolaan wilayah pesisir sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitiannya lebih banyak dilankukan pada lingkungan biologi dan ekologi. Penelitian dengan aspek-aspek lingkungan lainnya disamping ekologi yaitu sosial, ekonomi dan peran serta kelompok tani meliputi strateginya merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, kemudian untuk lokasi penelitian, penelitian sejenis belum pernah dilakukan.

Penelitian ini terutama ditekankan pada hubungan peran manusia dengan lingkungan pesisir, menganalisis kondisi lingkungan mangrove di Desa Pesantren, menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan hutan mangrove di Desa Pesantren, serta strategi apa yang diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hutan mangrove di Desa Pesantren sebagai upaya pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Sebagai perbandingan terhadap penelitian yang telah ada dan untuk menunjukan keaslian, maka disajikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul dan Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
1.	Indarjo et al, 2003,	Kesesuaian Rehabilitasi Mangrove di Desa Mojo, Desa Pesantren dan Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang	Untuk mengetahui kesesuaian rehabilitasi mangrove di Desa Mojo, Desa Pesantren dan Desa Lawangrejo	Desa Mojo dan Pesantren termasuk katategori sesuai untuk tanaman mangrove Rizhophora Mucronata, tetapi tidak demikian dengan desa Lawangrejo

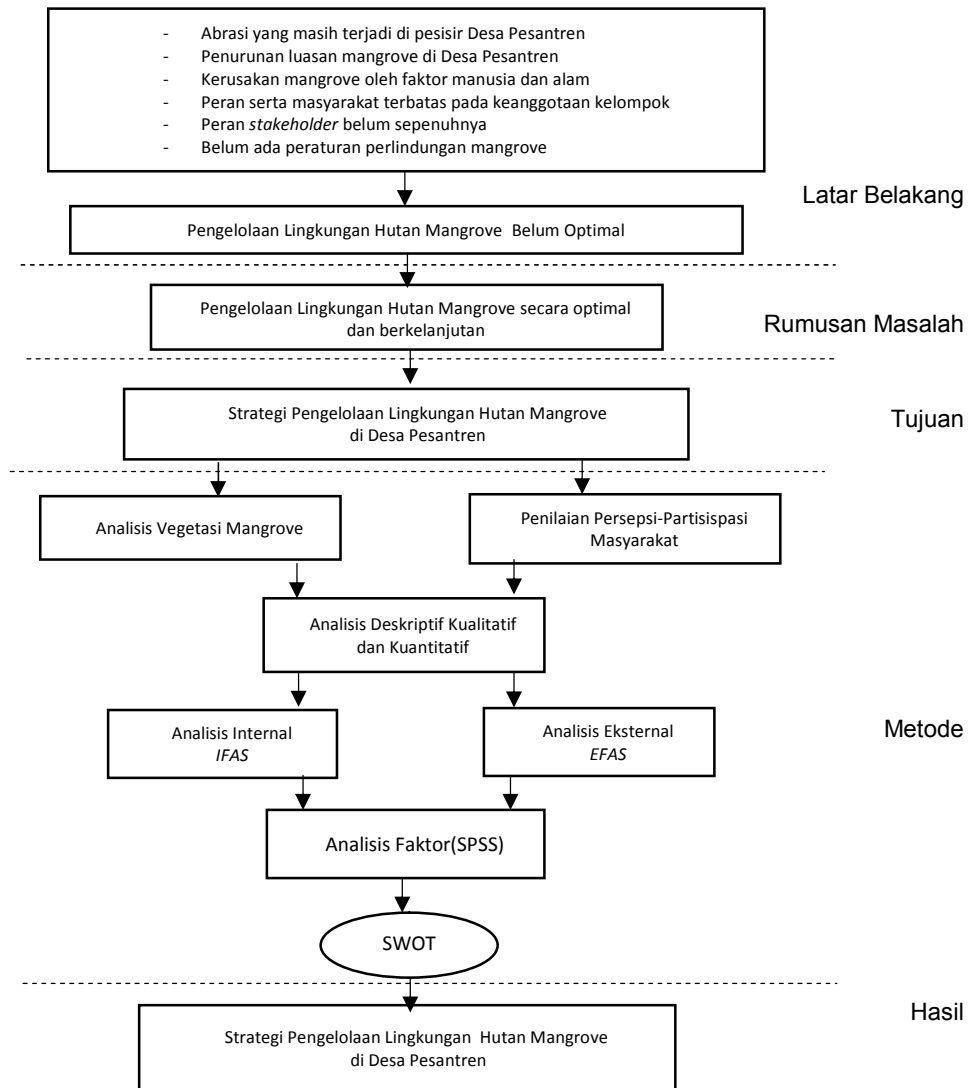


2.	Ismail, 2012	Dinamika Perubahan Garis Pantai Pekalongan dan Batang, Jateng	1. Menganalisis angkutan sedimen sepanjang pantai 2. Menganalisis perubahan garis pantai Pekalongan dan Batang dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun	1. Angkutan sedimen yang dominan ke Barat laut daripada ke Tenggara 2. Terjadi perubahan garis pantai karena adanya abrasi dan akresi
3.	(Ganis, dkk., 2013)	Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai jenis, manfaat dan pola sebaran mangrove di Desa Mojo 2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Dsa Mojo Mengenai ekosistem Mangrove? 3. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat Desa Mojo dalam mengelola hutan mangrove	1. Sebagian besar masyarakat mengetahui tentang mangrove 2. Persepsi masyarakat Desa Mojo cukup baik terhadap mangrove 3. Keterlibatan masyarakat Desa Mojo dalam pengelolaan mangrove tergolong rendah
6.	(Syawala, 2013)	Komposisi Vegetasi Mangrove di Pantai Desa Mojo Kabupaten Pemalang	Untuk mengetahui komposisi vegetasi hutan mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang	Terdapat 2 (dua) spesies mangrove di Desa Mojo yaitu Rhizophora mucronata dan Avicennia marina, dengan keragaman jenis yang rendah.
7.	Suyono (2015)	Pemetaan Degradasi Ekosistem Mangrove dan Abrasi Berbasis Geographic Information System di Kabupaten Brebes _ Jawa Tengah	Untuk mengetahui Kondisi Degradasi Mangrove dan Abrasi di Kabupaten Brebes	Kerapatan vegetasi mangrove di Kabupaten Brebes terdapat pada posisi : sangat jarang – sedang, dan laju degradasi mangrove sebesar 63.35 Ha/ tahun

## 1.6 AlurPikir Penelitian

Kelestarian lingkungan pesisir perlu dijaga untuk keberlangsungan dalam pengelolaanya. Salah satu upaya dalam pengendalian kerusakan pesisir adalah dengan penghijauan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka langkah awal untuk penelitian dilakukan menganalisis data terkait kondisi hutan mangrove di Desa Pesantren, mengetahui mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove, dan kemudian dilakukan analisis faktor internal dan eksternal yaitu kekuatan dan peluang

sebagai pendukung dan kelemahan serta hambatan sebagai pembatas sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi dalam upaya pengelolaan hutan mangrove sehingga dapat ditentukan strategi pengelolaan mangrove secara terus menerus. Secara rinci kerangka pemikiran tersebut dalam Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran